

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kondisi dan situasi yang makin berkembang di dunia saat ini terus mengalami banyak perubahan serta menimbulkan banyak permasalahan. Persoalan baik sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan dari masing-masing negara mengharapkan suatu sikap saling ketergantungan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul tersebut. Dan ketika kita berbicara permasalahan tersebut maka kita berbicara masalah sistem politik global. Dan di saat ini pula kegiatan politik yang meningkat dalam sistem global diperlukan suatu wadah untuk menyelesaikannya maka sebuah organisasi internasional mutlak dibutuhkan untuk menyalurkan sebuah permasalahan tersebut.

Konflik yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam yang telah terjadi sekian lama dimulai tahun 1976 sampai tahun 2005. Keadaan inilah yang memaksa pemerintah Indonesia untuk menyalurkan permasalahan atas konflik tersebut dan membutuhkan bantuan dalam mencari jalan untuk proses penyelesaian kepada organisasi internasional yang membutuhkan perhatian masyarakat global atas konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Nanggroe Aceh Darussalam ini. Berbagai organisasi internasional telah memberikan bantuan kepada Republik Indonesia dalam penyelesaian Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Nanggroe

Aceh Darussalam. Organisasi internasional seperti Henri Dunant Center (HDC) berusaha membantu penyelesaian konflik tersebut namun menemui kegagalan karena begitu kompleksnya permasalahan yang melatar belakangi terjadinya konflik di Nanggroe Aceh Darussalam. Kegagalan HDC tidak membuat organisasi internasional yang lain untuk berhenti membantu menyelesaikan konflik Gerakan Aceh Merdeka.

Salah satu organisasi internasional yang mampu membantu menyelesaikan permasalahan atas konflik tersebut adalah Crisis Management Initiative (CMI). CMI merupakan sebuah NGO internasional yang bergerak dalam bidang resolusi konflik yang berlokasi di pusat kota Helsinki, Finlandia yang berdiri pada tahun 2000¹. CMI berhasil menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Nanggroe Aceh Darussalam.

Dari penjelasan tersebut merupakan alasan dipilihnya judul “*Peran Crisis Management Initiative (CMI) Dalam Menangani Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)*” mengingat konflik GAM yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam telah menjadi permasalahan internasional yang mengharapakan sebuah penyaluran dan penyelesaian bersama dari organisasi internasional seperti CMI, hal ini sesuai dengan tujuan CMI sendiri yaitu membantu masyarakat internasional untuk keluar dari krisis internasional mulai dari isu

¹ www.acheinstitute.org, dikutip dari artikel Iskandar Zulkarnaen yang berjudul *Peran Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Konflik di Aceh; Analisa Kegagalan HDC Serta Prospek Damai MoU Helsinki*. (diakses tanggal 13 Oktober 2008)

kemanusiaan sampai dengan soal keamanan dan pembangunan¹ dan utamanya adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.

B. Latar Belakang Masalah

Perdamaian merupakan dambaan bagi masyarakat yang mengalami konflik panjang. Dimana dengan perdamaian yang ada, dimungkinkan kembali kemakmuran dan kestabilan ekonomi, sosial budaya serta kehidupan politik dalam tatanan pemerintahan.

Berbicara perdamaian, kita tidak bisa jauh dari sebab sebelum adanya hal tersebut, yaitu pertikaian yang terjadi antara dua pihak yang memperebutkan keinginan atau tujuan yang ingin dicapai. Pertikaian ini akan menimbulkan sebuah konflik yang berkepanjangan sampai adanya pembicaraan untuk mengakhiri pertikaian tersebut melalui musyawarah yang mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang akhirnya menghasilkan perdamaian.

Ketika kita berbicara mengenai konflik, banyak orang menggunakan kata "konflik" sebagai sebuah atau berbagai macam perbedaan arti baik perebutan kekuasaan politik, ekonomi atau perbedaan sosial, dan juga perang. Lincoln P. Bloomfield dan Allen berpendapat bahwa,

¹ Loc.cit

*" A Conflict begins when one or both or all sides begin to consider setting the dispute with force...it becomes a conflict when it starts to feel like something potentially more violent than a simple political difference."*¹

Jadi, konflik dimulai ketika satu atau dua atau bahkan kedua belah pihak memulai untuk melakukan sebuah tekanan dengan sebuah kekuatan. Dan konflik akan terjadi ketika sesuatu terasa atau berpotensi menjadi sebuah kekerasan dibandingkan dengan perbedaan pendapat yang kecil.

Pasca perang dingin perubahan terjadi dalam perkembangan konflik yang terjadi. Perubahan itu tidak lagi mengenai masalah perang senjata namun beralih kepada konflik dalam negeri yang terjadi antar saudara yang sama-sama membagi wilayah konflik yang muncul karena ras, etnik, budaya, agama maupun perbedaan lainnya.

Kemunculan konflik antar saudara yang terjadi di dalam negeri juga muncul di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), konflik yang terjadi telah menelan korban yang banyak dan tentu saja menarik perhatian dunia Internasional. Konflik ini terjadi karena keinginan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk berdiri sendiri menjadi negara merdeka tanpa terikat dengan Indonesia.

NAD terletak di bagian ujung utara pulau Sumatera. Ada banyak julukan yang dilekatkan pada wilayah terkaya di Asia Tenggara tersebut seperti Serambi Mekkah

¹ Lincoln P. Bloomfield and Allen Moulten, *Managing International Conflict: From Theory to Policy*, St Martins Press, New York.

“Tanoh Lhee Sagoe” atau Tanah Segitiga maupun Tanah Rencong.¹ Tidak hanya julukan sebagai Serambi Mekkah yang melekat, namun juga julukan ” Aceh Bersimbah Darah”, hal ini terjadi karena begitu banyaknya pertumpahan darah di Bumi Serambi Mekkah ini, mulai dari perang sampai gempa bumi. Sejarah pertumpahan darah di Aceh dimulai pada tahun 1520 dalam perang mengusir Portugal. Berikutnya adalah perang melawan Belanda yang berlangsung selama tiga puluh tahun. Sejarah Aceh mulai memilukan justru ketika ia menjadi bagian dari NKRI, konfrontrasi dengan pemerintah pusat dalam pemberontakan DI/TII, perang Cumbok dan perlawanan terhadap TNI melalui upaya pemisahan diri.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diploklamirkan oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976.² Gerakan Aceh Merdeka ini muncul akibat ketidakpuasan Aceh terhadap pemerintah pusat yang dianggap telah berlaku tidak adil disetiap sektor kehidupan di Aceh, terutama ekonomi. Hasil alam Aceh dieksploitasi secara besar-besaran namun Aceh tidak mengalami pembangunan yang setara dengan hasil alamnya yang melimpah.

Pemberontakan GAM ini juga dibangun dengan landaskan ideologi nasionalis ke-Acehan yang dibangun oleh Hasan Tiro. Keyakinan Hasan Tiro dengan sejarah

¹ www.acheinstitute.org, di kutip dari artikel *Peran Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Konflik di Aceh ; Analisa Kegagalan HDC Serta Prospek Damai MoU Helsinki*. (di akses tanggal 13 Oktober 2008)

²http://www.acheinstitute.org/opini_alkaf_090107_multikulturalisme.htm, di kutip dari artikel *Aceh dan Tantangan Multikulturalisme*, (akses tanggal 13 Oktober 2008)

kejayaan Aceh di masa lampau untuk berdiri sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintahan pusat.

Pada awal berdirinya, GAM telah mengalami tekanan dari pemerintah pusat dengan dilakukannya operasi militer. Keadaan ini membuat kekuatan GAM melemah, dan sekitar tahun 1980 an GAM mulai menemukan kekuatannya kembali. Hal ini dikarenakan banyaknya personel GAM yang berasal dari alumni pelatihan militer di Libya. Aksi-aksi militer anggota GAM dari alumni Libya ternyata lebih kuat dan lebih variatif. Keadaan ini membuat pemerintah pusat menetapkan Daerah Operasi Militer untuk mencegah semakin meluasnya aksi-aksi militer GAM. Operasi militer ini membuat kekuatan GAM kembali surut.

Darurat Sipil dan Darurat Militer yang ditetapkan oleh pemerintah pusat telah mengakibatkan kehancuran di berbagai penjuru Aceh. Dari pembunuhan warga sipil, dibakarnya sekolah-sekolah sampai matinya roda perekonomian rakyat.

Keadaan ini terjadi sampai Aceh diguncang gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang memporak-pandakan Aceh secara luar biasa¹. Keadaan inilah yang kembali membuat mata dunia internasional kembali melihat Aceh yang selama darurat militer dan sipil terisolasi oleh dunia internasional. Walau pada awalnya perhatian dunia internasional lebih tertuju kepada bantuan kemanusiaan. akan tetapi

¹ Ibid.hal 5

lama kelamaan dialihkan kepada bantuan secara politik, yaitu mengusahakan perdamaian antara RI-GAM yang telah berkonflik hampir tiga puluh tahun.

Peran dari organisasi internasional yang peduli dengan keadaan di Nanggroe Aceh Darussalam sangat diperlukan untuk menyelesaikan konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada era Gus Dur-lah permasalahan Aceh mulai dibuka dan melibatkan pihak ketiga yaitu Henry Dunant Center (HDC) dalam penyelesaian konflik di dalamnya yang berakhir dengan kegagalan. Kemudian pada era pemerintahan SBY-JK, pembicaraan damai kembali dilanjutkan. Kali ini yang menjadi pihak ketiga adalah Crisis Management Initiative (CMI) yang bermarkas di Helsinki, Finlandia.

A. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapatlah ditarik sebuah pokok permasalahan yaitu : Bagaimana peran Crisis Management Initiative (CMI) dalam menangani Konflik GAM di Nanggroe Aceh Darussalam?

B. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut maka penulis menggunakan Teori Peranan (Role Theory), Konsep Konflik (Conflict Concept), dan Konsep fasilitator.

1. Teori Peranan (Role Theory)

Sebuah peranan atau serangkaian peranan yang dipegang merupakan salah satu kendala para pembuat keputusan luar negeri dalam perilaku dalam sebuah proses politik. Peranan atau (Role) merupakan perilaku yang diharapkan dari pemegang posisi seperti pembuat undang-undang, pemimpin partai, pemilih atau revolusioner, berkenaan dengan pengambilan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang sah bagi masyarakat.¹ Teori Peranan menegaskan bahwa "Perilaku Politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik"² Teori ini mengasumsikan bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan di pegang oleh seorang aktor politik.

Di dalam teori peran di bentuk oleh harapan-harapan atau dugaan-dugaan. Harapan merupakan suatu konsep dari teori peran dan didalamnya ada tiga kelas dari harapan yang ingin dicapai yang melambangkan visi teori peran yaitu harapan dari norma, harapan dari pihak lain dan harapan dari audience. Harapan dari norma didalamnya terdapat hal yang menetapkan bagaimana seseorang individu sebaiknya bertingkah laku dan melakukan aktivitas mereka sesuai dengan apa yang telah diatur oleh norma yang telah ada. Harapan dari pihak lain dimana peran yang diinginkan hanya tertuju pada permintaan yang diberikan saat mereka menanggapi dan

¹ Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisa dan Teorisasi*, Yogyakarta, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989, hal 44.

² Heinz Eulau di kutip dalam Alan Asaak, *Scope and Methods of Political Science* (Homewood, HI, 1981), h.254.

berinteraksi. Harapan dari audience, merupakan harapan terakhir yang diberikan dari audience terhadap individu yang menempati status.

Berbagai harapan itu di lakukan menurut aturan dan norma yang sudah ada. Dan untuk menganalisa "Peran Crisis Management Initiative (CMI) Dalam Menangani Konflik GAM di Nanggroe Aceh Darussalam" teori peran juga harus memperhatikan diantaranya ketiga harapan yang ada tersebut.

Dalam kaitanya dengan konflik GAM yang terjadi di Aceh, NGO seperti Crisis Management Initiative (CMI) merupakan sebuah organisasi internasional yang berperan dalam penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Nanggroe Aceh Darussalam. Peranan CMI dalam penyelesaian konflik tersebut merupakan perilaku politik yang diharapkan dari pihak lain. Peran CMI dalam penanganan konflik di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan peran yang di dapat karena permintaan dari kedua belah pihak, yaitu GAM-RI. Dengan kata lain peran didapat karena diundang oleh pihak lain bukan inisiatif sendiri. CMI menyepakati permintaan GAM-RI untuk datang ke Indonesia dan berusaha membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan pokok dari lembaga non government ini, yaitu membantu masyarakat internasional untuk keluar dari krisis internasional mulai dari isu kemanusiaan sampai dengan

soal keamanan dan pembangunan.¹ Berdasar dari tujuan pokok itulah, CMI membantu pemerintah Republik Indonesia untuk menangani konflik Gerakan Aceh Merdeka yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

1. Konsep Konflik (Conflict Consept)

Suatu jenis interaksi yang ditandai dengan bentrokan-bentrokan atau tubrukan diantara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang sama lain saling bertentangan.² Dalam analisa politik, konsep konflik yang bertentangan dan kerjasama digunakan untuk menggolongkan dua bentuk dasar kegiatan politik. Konflik politik mempunyai berbagai perwujudan , mulai dari pernyataan tidak setuju secara lisan bahkan dengan perlawanan fisik. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat yang mengancam stabilitas masyarakat atau yang dapat mengakibatkan kekerasan yang hebat atau besar biasanya memaksa campur tangan pemerintah. Di dalam lingkup internasional, konflik terjadi dalam bentuk persaingan politik mulai dari diplomasi hingga perang yang mendorong terjadinya perang dan bentrokan.

¹ www.acheinstitute.org, dikutip dari artikel Iskandar Zulkarnaen yang berjudul *Peran Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Konflik di Aceh; Analisa Kegagalan HDC Serta Prospek Damai MoU Helsinki*. (diakses tanggal 13 Oktober 2008)

² Jack C Plano, Robert E.Riggs dan Helenan S Robin, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, hal 40.

Untuk menekan terjadinya konflik, pemerintah menggunakan berbagai macam pendekatan, termasuk harapan-harapan, ganjaran-ganjaran, ancaman yang akhirnya dalam bentuk paksaan fisik.

Menurut Karl Marx dan Thomas Hobes, konflik terjadi secara wajar sesuai dengan yang melekat dalam sifat manusia atau dalam sistem politik tertentu. Dalam politik internasional konflik dapat menjadi faktor yang menyampingkan pengaturan, interaksi antar negara-negara.¹

Konflik GAM yang terjadi di Naggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu interaksi yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan, gagasan, serta kebijaksanaan diantara NAD dan GAM. Perbedaan kebijakan pengalokasian Sumber Daya Alam antara daerah dan pusat mengakibatkan GAM menginginkan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik GAM ini telah mengancam stabilitas pemerintah yang akhirnya masyarakat sipil yang menjadi korbannya.

1. Konsep Fasilitator

Ketika kita berbicara mengenai fasilitator, maka terlebih dahulu kita mengerti arti dari kata dasar fasilitator, yaitu fasilitas. Fasilitas merupakan sarana atau wahana yang di berikan oleh suatu lembaga atau perseorangan yang dapat mempermudah tujuan yang ingin dicapai, baik itu kekuasaan, keinginan ataupun kesepakatan.

¹ Loc. Cit

Fasilitator merupakan orang atau sekelompok orang yang memberikan bantuan dalam pencapaian kekuasaan, keinginan ataupun kesepakatan melalui diskusi atau musyawarah atau perundingan yang menghasilkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.¹

Menurut Michael Doyle, fasilitator di definisikan sebagai "individu yang memungkinkan sekelompok orang atau organisasi untuk bekerja dengan hasil yang memuaskan dalam bekerjasama dan mencapai mufakat. Mereka (fasilitator) adalah pihak yang berada di blok netral, yang tidak memihak salah satu kelompok dan dapat bersikap adil dan terbuka selama perundingan berlangsung".²

Dalam perundingan sangat dibutuhkan fasilitator untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama untuk mengatasi permasalahan yang dibicarakan. Fasilitator memberikan dukungan penuh dan saling pengertian sehingga mendapatkan solusi yang tepat. Atau yang dikutip dari Sam Kaner dan rekan-rekannya yaitu :

*"The facilitator's job is to support everyone to do their best thinking. To do this, the facilitator encourages full participation, promotes mutual understanding and cultivates shared responsibility. By supporting everyone to do their best thinking, a facilitator enables group members to search for inclusive solutions and build sustainable agreements"*³

¹ di kutip dari, en.wikipedia.org/wiki/fasilitator (tanggal 19 November 2008)

² Loc. Cit

³ Sam Kaner dengan Lenny Lind, Catherine Toldi, Sarah Fisk and Duane Berger, *Facilitator's Guide to Participatory Decision-Making* Jossey Bass; ISBN 0-7879-8266-0 (2007), dikutip dari en.wikipedia.com/wiki/fasilitator. (tanggal 19 November 2008)

Jadi, fasilitator dapat membantu memecahkan permasalahan yang sedang di bicarakan dalam perundingan. Solusi yang di sampaikan dapat memberikan pengertian antar kedua belah pihak yang sedang berkonflik sehingga antara keduanya menemukan titik temu, yaitu sebuah perdamaian.

Dalam konflik GAM, fasilitator di pegang oleh pihak CMI yang memfasilitatori terwujudnya perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam dengan di tanda tangani MoU Helsinki antara RI dan GAM. CMI memberikan bantuan melalui diskusi atau perundingan damai yang menghasilkan solusi berupa kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dalam hal ini adalah antara RI atau NAD dengan GAM.

A. Hipotesa

Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesa bahwa peran Crisis Management Initiative (CMI) dalam menangani konflik GAM di NAD adalah sebagai fasilitator terwujudnya perdamaian antara RI dengan GAM melalui nota kephahaman RI-GAM di Helsinki, Finlandia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Peran CMI Dalam Menangani Konflik GAM di Nanggroe Aceh Darussalam adalah :

1. Memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa untuk menegrjakan tugas akhir dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai syarat melengkapi proses pendidikan strata 1.
2. Mengaplikasikan teori-teori tentang Ilmu Hubungan Internasional dan segala aspek yang mendukung terhadap kegiatan akademik yang selama ini dipelajari dipelajari penulis di Universiyas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Memberikan gambaran terhadap peran yang telah dilakukan Crisis Management Initiative (CMI) sebagai Organisasi Internasional dalam proses penyelesaian konflik GAM di Nanggroe Aceh Darussalam.

A. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dari penulisan ini dititik beratkan pada awal Crisis Management Initiative (CMI) berperan dalam menangani konflik GAM di NAD sampai MoU Helsinki antara RI dan GAM ditanda tangani, yaitu antara Januari 2005 sampai Agustus 2005. Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga meneliti dari periode awal terjadinya konflik di Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu dari periode tahun 1976.

A. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penulisan ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data sekunder dari buku-buku ataupun majalah, media massa termasuk internet, dan literature-literatur yang sesuai.

B. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan

BAB II Crisis Management Initiative

Bab ini memberikan gambaran tentang Crisis Management Initiative (CMI) sebagai organisasi non government yang telah membantu dalam penyelesaian konflik GAM di Nanggroe Aceh Darussalam

BAB III Konflik di Nanggroe Aceh Darussalam

Bab ini menjelaskan tentang sejarah konflik di Nanggroe Aceh Darussalam, dan upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan

konflik di Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB IV Peran CMI sebagai fasilitator antara GAM dan RI

Bab ini menjelaskan tentang peran CMI sebagai fasilitator terwujudnya perdamaian antara GAM dan RI melalui perjanjian Helsinki.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian.